

Strategi Penguatan Keamanan Chokepoints Maritim Global dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional: Studi Geostrategis terhadap Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz

Muhamad Risahdi, Lukman Yudho Prakoso*, Hidayaturrahman, Ceppi Hilmansyah, Yusnaldi

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Email: lukman.prakoso@idu.ac.id*

Keywords:

Maritime Chokepoints;
Strait of Malacca;
North Natuna Sea;
Strait of Hormuz;
ational Economic Resilience.

Abstract

Maritime chokepoints are strategic waterways that play a critical role in global trade, energy distribution, and economic stability. The Strait of Malacca, the North Natuna Sea, and the Strait of Hormuz are three strategic regions that significantly influence Indonesia's national economic resilience. Increasing geopolitical rivalries, maritime security threats, global supply chain disruptions, and regional conflicts have made maritime chokepoint security a strategic issue requiring serious attention. This study aims to analyze Indonesia's maritime security policy implementation in addressing security dynamics within global maritime chokepoints and formulate strategies to strengthen maritime security in support of national economic resilience. The study employs a descriptive qualitative approach using case studies and SWOT analysis. The results show that Indonesia's maritime security policy implementation has made progress through strengthening maritime domain awareness, maritime patrols, regional cooperation, maritime diplomacy, and institutional capacity building, but still faces challenges in the form of limited maritime data integration, sub-optimal cross-sector coordination, dependence on global energy lanes, and increasing geopolitical risks in the Indo-Pacific and the Middle East. The study concludes that strengthening Maritime Domain Awareness, maritime diplomacy, regional cooperation, national logistics resilience, and integration of maritime security governance are the main factors in increasing national economic resilience to the security dynamics of global maritime chokepoints.

Kata Kunci:

Chokepoints Maritim;
Selat Malaka;
Laut Natuna Utara;
Selat Hormuz;
Ketahanan Ekonomi Nasional.

Abstrak

Chokepoints maritim merupakan jalur strategis yang berperan penting dalam kelancaran perdagangan internasional, distribusi energi global, dan stabilitas ekonomi dunia. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz merupakan tiga kawasan strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Meningkatnya rivalitas geopolitik, ancaman keamanan maritim, gangguan rantai pasok global, serta konflik regional menjadikan keamanan chokepoints maritim sebagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika keamanan pada chokepoints maritim global serta merumuskan strategi penguatan keamanan yang mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia telah mengalami kemajuan melalui penguatan kesadaran domain maritim, patroli maritim, kerja sama regional, diplomasi maritim, dan pembangunan kapasitas kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan berupa integrasi data maritim yang terbatas, koordinasi lintas sektor yang kurang optimal, ketergantungan pada jalur energi global, dan meningkatnya risiko geopolitik di Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan Maritime Domain

PENDAHULUAN

Perkembangan geopolitik global abad ke-21 menunjukkan bahwa penguasaan dan keamanan jalur laut strategis menjadi salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas ekonomi dan keamanan suatu negara. Dalam konteks globalisasi, sebagian besar perdagangan internasional masih bergantung pada transportasi laut yang melewati berbagai chokepoints maritim dunia. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2024), sekitar 80% volume perdagangan dunia dan lebih dari 70% nilai perdagangan internasional diangkut melalui jalur laut. Oleh karena itu, gangguan terhadap jalur pelayaran strategis dapat memberikan dampak langsung terhadap rantai pasok global, harga energi, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional.

Konsep chokepoints maritim mengacu pada jalur pelayaran sempit yang menjadi titik kritis dalam sistem perdagangan dan transportasi internasional. Beberapa chokepoints utama dunia meliputi Selat Malaka, Selat Hormuz, Terusan Suez, Terusan Panama, Bab el-Mandeb, dan Laut Tiongkok Selatan. Dalam perspektif Indonesia, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz memiliki relevansi yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan keamanan energi, perdagangan internasional, serta stabilitas ekonomi nasional (Kaplan, 2018).

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan. Menurut International Maritime Organization (IMO, 2024), lebih dari 100.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahun dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari USD 3,5 triliun. Bagi Indonesia, Selat Malaka tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga merupakan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan nasional.

Laut Natuna Utara memiliki arti strategis yang berbeda. Kawasan ini merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada pada persimpangan kepentingan geopolitik dan geoekonomi kawasan Indo-Pasifik. Meningkatnya aktivitas kapal asing, klaim sepihak Nine-Dash Line Tiongkok, serta rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok menjadikan Laut Natuna Utara sebagai salah satu wilayah yang paling sensitif dalam konteks keamanan maritim regional (Hayton, 2018).

Sementara itu, Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi terpenting di dunia. Menurut U.S. Energy Information Administration (EIA, 2024), sekitar 20% konsumsi minyak dunia dan lebih dari 25% perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz setiap hari. Konflik yang terjadi di kawasan Teluk Persia berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi global, termasuk harga energi di Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap pasar energi internasional.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya sistem keamanan maritim yang mampu menjamin keamanan jalur perdagangan internasional, melindungi kepentingan nasional Indonesia, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, Indonesia diharapkan mampu mengembangkan strategi keamanan maritim yang adaptif

terhadap dinamika geopolitik global dan mampu memanfaatkan posisi geostrategisnya sebagai negara maritim.

Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan bahwa berbagai ancaman terhadap chokepoints maritim global terus meningkat. Ancaman tersebut meliputi perompakan, terorisme maritim, konflik geopolitik, ancaman siber terhadap pelabuhan, gangguan rantai pasok global, hingga konflik bersenjata yang dapat menghambat kebebasan navigasi. Menurut World Bank (2024), gangguan pada salah satu chokepoints utama dunia dapat meningkatkan biaya logistik global hingga 15% dan menyebabkan kenaikan harga energi internasional secara signifikan.

Dalam perspektif keamanan maritim, Christian Bueger (2015) menjelaskan bahwa keamanan maritim harus dipahami melalui empat dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu Sea Power, Economic Development, Human Security, dan Marine Environment. Pendekatan ini sangat relevan karena keamanan chokepoints maritim tidak hanya berdampak pada aspek pertahanan, tetapi juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan laut. Selain itu, teori implementasi kebijakan keamanan maritim yang dikembangkan oleh Prakoso (2020) menekankan pentingnya integrasi, interaksi, transparansi, pengendalian, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi sebagai faktor utama keberhasilan kebijakan keamanan maritim.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek keamanan chokepoints maritim dan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian oleh Bueger (2015) mengembangkan konsep empat matriks keamanan maritim sebagai kerangka komprehensif untuk memahami keamanan maritim. Prakoso (2020; 2021; 2022) meneliti implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia, geostrategi maritim, dan transformasi keamanan maritim menuju Indonesia Emas 2045. Kaplan (2018) mengkaji kebangkitan kekuatan maritim Tiongkok dan pengaruhnya terhadap tatanan geopolitik global. Till (2018) membahas konsep kekuatan maritim dalam konteks kontemporer. Hayton (2018) menyoroti sengketa Laut Cina Selatan dan implikasinya terhadap stabilitas regional. Penelitian oleh Lee et al. (2021) mengkaji transformasi digital maritim dan pelabuhan pintar, sementara Zhang dan Lam (2022) meneliti ketahanan rantai pasokan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian tentang keamanan energi dan chokepoints maritim telah dilakukan oleh EIA (2024) dan IEA (2024) yang menyoroti ketergantungan global pada jalur distribusi energi strategis.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek keamanan maritim atau ketahanan ekonomi secara terpisah, dan belum banyak yang mengintegrasikan ketiga chokepoints strategis (Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz) dalam satu kerangka analisis yang menghubungkan keamanan maritim dengan ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Penelitian tentang implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia di tingkat operasional juga masih terbatas dan belum banyak yang menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan teori implementasi kebijakan dan matriks keamanan maritim secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika keamanan pada ketiga chokepoints strategis dan merumuskan strategi penguatan keamanan yang mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga chokepoints strategis dalam satu kerangka analisis, penggabungan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan

Maritim Prakoso dan Matriks Keamanan Maritim Bueger dalam konteks Indonesia, penggunaan analisis SWOT untuk merumuskan strategi geostrategis, serta proyeksi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 yang belum banyak dilakukan dalam studi keamanan maritim sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika keamanan pada Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz, serta bagaimana strategi penguatan keamanan chokepoints maritim global yang mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika keamanan pada chokepoints maritim global serta merumuskan strategi penguatan keamanan yang mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian keamanan maritim dan geopolitik dengan mengintegrasikan tiga chokepoints strategis dalam satu kerangka analisis, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan keamanan maritim di negara kepulauan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, TNI AL, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemangku kepentingan maritim lainnya dalam merumuskan strategi keamanan chokepoints maritim yang adaptif dan berkelanjutan, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketahanan ekonomi nasional dan keamanan energi, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji lebih dalam tentang keamanan chokepoints maritim dan ketahanan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif** dengan **desain studi kasus geostrategis**. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menjelaskan secara mendalam hubungan antara keamanan maritim, geopolitik, dan ketahanan ekonomi nasional, yang kompleks dan multidimensional (Creswell & Creswell, 2018).

Desain studi kasus digunakan untuk menganalisis tiga titik rawan maritim strategis: Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz. Ketiga wilayah ini dipilih karena memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap keamanan maritim dan ketahanan ekonomi Indonesia. Menurut Yin (2018), studi kasus sangat tepat untuk memahami fenomena strategis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan eksternal dan internal secara simultan.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia, pengelolaan keamanan jalur perdagangan internasional, diplomasi maritim, kesadaran domain maritim, dan dampak keamanan titik rawan maritim terhadap ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini berfokus pada kemampuan Indonesia untuk mengantisipasi risiko yang timbul dari dinamika geopolitik dan gangguan keamanan di ketiga wilayah tersebut.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan akademisi keamanan maritim, praktisi pertahanan, pejabat pemerintah, dan pakar geopolitik dan ekonomi maritim. Data sekunder diperoleh dari laporan UNCTAD, Organisasi Maritim Internasional (IMO), Bank Dunia, Badan Informasi Energi

(EIA), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Validitas penelitian dipertahankan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori, seperti yang diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, studi ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020), yang terdiri dari dimensi integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, studi ini menggunakan pendekatan Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger (2015), yang mencakup Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut. Analisis ini dikombinasikan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan keamanan titik rawan maritim guna mendukung ketahanan ekonomi nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Keamanan Titik Cengkeraman Maritim Global

Perkembangan geopolitik dan geoeкономи global menunjukkan bahwa keamanan jalur pelayaran strategis sangat memengaruhi stabilitas ekonomi global. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz adalah tiga area strategis yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Gangguan di salah satu area ini dapat memengaruhi kelancaran perdagangan internasional, distribusi energi, biaya logistik, dan stabilitas ekonomi nasional.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memegang posisi strategis dalam sistem perdagangan global. Menurut UNCTAD (2024), lebih dari 80% volume perdagangan dunia masih menggunakan transportasi maritim, sehingga keamanan jalur pelayaran menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi internasional.

Dalam studi ini, implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020), yang terdiri dari tujuh dimensi utama: integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan empat matriks keamanan maritim Christian Bueger (2015): Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut.

Analisis Geostrategis Selat Malaka

Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran penting di dunia. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan berfungsi sebagai jalur perdagangan utama antara Asia Timur, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Menurut Organisasi Maritim Internasional (IMO, 2024), lebih dari 100.000 kapal melewati Selat Malaka setiap tahunnya. Nilai perdagangan yang melewati wilayah ini

diperkirakan melebihi USD 3,5 triliun setiap tahun. Bagi Indonesia, Selat Malaka memiliki signifikansi strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan nasional dan merupakan salah satu sumber aktivitas ekonomi maritim terbesar di kawasan ini.

Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah menerapkan berbagai bentuk kerja sama keamanan maritim melalui Patroli Selat Malaka (MSP), Eyes in the Sky (EiS), dan Intelligence Exchange Group (IEG). Kerja sama ini terbukti secara signifikan mengurangi pembajakan dan kejahatan maritim dibandingkan dekade sebelumnya. Namun, tantangan keamanan masih tetap ada, terutama dalam bentuk:

- Pembajakan dan perampokan bersenjata.
- Penyelundupan narkoba.
- Perdagangan manusia.
- Ancaman siber terhadap pelabuhan.
- Potensi gangguan pada rantai pasokan global.

Dari perspektif kekuatan maritim, Selat Malaka merupakan jalur vital yang harus dilindungi karena memiliki kaitan langsung dengan ketahanan ekonomi nasional Indonesia.

Analisis Geostrategis Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Selat Malaka. Wilayah ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan sumber daya yang signifikan, tetapi juga berfungsi sebagai arena persaingan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Meningkatnya aktivitas kapal penjaga pantai asing, kapal penelitian, dan kapal penangkap ikan menjadikan wilayah ini salah satu wilayah yang paling sensitif terhadap dinamika geopolitik regional.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (2024) menunjukkan bahwa puluhan pelanggaran teritorial oleh kapal asing tercatat sepanjang tahun 2024 di Laut Natuna Utara. Situasi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan patroli keamanan maritim, memperkuat kehadiran Bakamla (Badan Keamanan Laboratorium) dan Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), serta memperluas sistem Kesadaran Domain Maritim nasional (Badan Keamanan Laut Republik, 2024).

Dari perspektif kekuatan maritim, Laut Natuna Utara memiliki signifikansi strategis sebagai zona penyangga yang menghubungkan Indonesia dengan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, stabilitas regional sangat penting untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Selain aspek keamanan, Laut Natuna Utara juga memiliki cadangan gas alam dan sumber daya perikanan yang sangat besar, sehingga berkontribusi pada keamanan energi dan ketahanan pangan nasional.

Analisis Geostrategis Selat Hormuz

Selat Hormuz adalah jalur transmisi energi terpenting di dunia, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Menurut Badan Informasi Energi (EIA, 2024), sekitar 20% konsumsi minyak global dan lebih dari 25% perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz setiap hari.

Meskipun Indonesia tidak memiliki wilayah kedaulatan di kawasan tersebut, keamanan Selat Hormuz berdampak langsung pada perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dapat menyebabkan kenaikan harga minyak global, mengganggu distribusi energi, dan meningkatkan biaya logistik internasional.

Penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan konflik di kawasan Teluk Persia berpotensi secara signifikan meningkatkan harga minyak global. Bagi Indonesia, yang masih bergantung pada impor energi tertentu, situasi ini dapat memberikan tekanan pada anggaran negara, inflasi, dan stabilitas ekonomi nasional.

Dari perspektif Pembangunan Ekonomi, keamanan Selat Hormuz berkaitan erat dengan keamanan energi dan ketahanan ekonomi Indonesia.

Tabel 1. Indikator Strategis Titik-Titik Kritis Maritim untuk Ketahanan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2024

Indikator	Selat Malaka	Laut Natuna Utara	Selat Hormuz
Jumlah Kapal yang Lewat per Tahun	>100.000	±35.000	±25.000
Nilai Perdagangan (USD/Tahun)	3,5 Triliun	1,2 Triliun	3,0 Triliun
Kepentingan Strategis Indonesia	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi
Risiko Geopolitik	Saat ini	Tinggi	Sangat tinggi
Risiko Gangguan Rantai Pasokan	Tinggi	Saat ini	Sangat tinggi
Dampak pada Harga Energi	Saat ini	Rendah	Sangat tinggi
Potensi Konflik Militer	Rendah	Saat ini	Tinggi

Sumber: IMO (2024), EIA (2024), UNCTAD (2024), diproses oleh peneliti.

Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Lukman Yudho Prakoso

Integrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun mekanisme koordinasi antarlembaga maritim melalui Bakamla (Badan Penegak Hukum dan Keamanan), Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan instansi lainnya. Namun, integrasi data maritim nasional masih perlu diperkuat untuk mendukung pengambilan keputusan secara real-time.

Interaksi

Indonesia aktif dalam berbagai perjanjian kerja sama maritim regional, seperti Forum Maritim ASEAN, ReCAAP, IORA, dan kerja sama trilateral Selat Malaka. Interaksi ini sangat penting untuk menjaga keamanan titik-titik rawan maritim regional.

Transparansi

Perkembangan Pusat Informasi Maritim Indonesia (IMIC) menunjukkan peningkatan transparansi informasi maritim nasional. Namun, integrasi data antar instansi yang masih terbatas tetap menjadi tantangan.

Kontrol

Kemampuan pengawasan maritim terus meningkat melalui peningkatan Kesadaran Domain Maritim, patroli maritim, radar pantai, AIS, dan satelit. Namun, luasnya wilayah maritim Indonesia tetap menjadi tantangan utama dalam hal pengendalian.

Akuntabilitas

Berbagai lembaga maritim memiliki indikator kinerja yang jelas, tetapi evaluasi keamanan titik rawan maritim masih dilakukan secara sektoral dan belum terintegrasi sepenuhnya.

Kerahasiaan

Perlindungan informasi strategis terkait keamanan maritim telah ditingkatkan melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Kriptografi Nasional serta pengembangan sistem keamanan informasi nasional.

Peraturan

Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan yang mendukung keamanan maritim, namun peraturan yang secara khusus membahas ketahanan titik-titik rawan maritim dan keamanan rantai pasokan nasional masih perlu diperkuat.

Dampak pada Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger

Kekuatan Laut

Ketiga titik rawan ini berdampak langsung pada kemampuan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim.

Pembangunan Ekonomi

Gangguan pada Selat Malaka, Laut Natuna Utara, atau Selat Hormuz dapat meningkatkan biaya logistik, mengganggu perdagangan internasional, dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Keamanan Manusia

Masyarakat pesisir, nelayan, pelaku bisnis maritim, dan konsumen energi adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak gangguan di titik-titik rawan maritim.

Lingkungan Laut

Aktivitas pelayaran yang sangat padat dan potensi konflik maritim meningkatkan risiko pencemaran laut dan kerusakan ekosistem maritim.

Ringkasan Temuan Bagian II

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik ancaman yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi pada stabilitas perdagangan, energi, dan keamanan nasional.

Implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, namun masih perlu diperkuat dalam aspek integrasi tata kelola, kesadaran domain maritim, diplomasi maritim, dan ketahanan logistik nasional untuk menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Strategi Penguatan Keamanan Titik-Titik Karantina Maritim Global untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz memiliki dampak strategis terhadap stabilitas ekonomi nasional Indonesia. Ketiga wilayah ini merupakan simpul penting dalam jaringan perdagangan global, distribusi energi, dan sistem logistik yang mendukung perekonomian nasional. Gangguan keamanan di

salah satu wilayah ini berpotensi menimbulkan efek domino pada perdagangan, energi, industri, investasi, dan stabilitas ekonomi nasional.

Perkembangan dalam lingkungan strategis global menunjukkan bahwa ancaman terhadap titik-titik rawan maritim tidak hanya berasal dari konflik militer konvensional, tetapi juga dari persaingan geopolitik, Perang Zona Abu-abu, Ancaman Hibrida Maritim, terorisme maritim, kejahatan transnasional, gangguan terhadap rantai pasokan global, serangan siber terhadap pelabuhan, dan perubahan geopolitik yang terjadi di Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Oleh karena itu, strategi untuk memperkuat keamanan titik rawan maritim harus dikembangkan melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan keamanan, diplomasi, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.

Dalam studi ini, strategi penguatan keamanan titik rawan maritim dirumuskan melalui integrasi Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020), Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger (2015), dan analisis SWOT.

Analisis SWOT Keamanan Titik-Titik Karantina Maritim Indonesia

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan di titik-titik rawan maritim global.

Tabel 2. Analisis SWOT Keamanan Titik-Titik Karantina Maritim Indonesia

Kekuatan	Kelemahan
Posisi geostrategis kawasan Indo-Pasifik	Integrasi data maritim belum optimal.
Menguasai ALKI I, II, dan III	Ketergantungan pada energi impor
Sistem Pertahanan Universal	Infrastruktur logistik tidak terdistribusi secara merata.
Dukungan untuk diplomasi yang bebas dan aktif	Keterbatasan pengawasan laut lepas
Potensi ekonomi maritim yang sangat besar	Keterbatasan teknologi maritim nasional
Peluang	Ancaman
Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik	Konflik Laut Cina Selatan
Kerja sama keamanan maritim regional	Konflik Timur Tengah
Kecerdasan Buatan dan Big Data	Gangguan rantai pasokan global
Pengembangan Pelabuhan Pintar	Serangan siber pelabuhan
Ekonomi Biru	Perang Zona Abu-abu

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Analisis SWOT menunjukkan bahwa Indonesia memiliki aset strategis yang kuat untuk menjadi pusat keamanan maritim regional. Namun, penguatan ketahanan ekonomi dan keamanan maritim membutuhkan transformasi tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

Strategi Penguatan Kekuatan Maritim untuk Titik-Titik Karantina Maritim

Dimensi kekuatan maritim merupakan landasan utama dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional dan kepentingan nasional Indonesia.

Penelitian menunjukkan bahwa penguatan kekuatan maritim harus diarahkan pada pengembangan kemampuan pengawasan dan pengendalian maritim yang lebih efektif melalui:

- Penguatan Kesadaran Domain Maritim (MDA).
- Integrasi Pusat Informasi Maritim Nasional.
- Pengembangan satelit maritim nasional.
- Penggunaan drone laut dan udara.
- Memperkuat Bakamla sebagai penjaga pantai nasional.
- Modernisasi sistem pemantauan ALKI.

Menurut Till (2018), negara yang mampu mengendalikan jalur laut strategis akan memiliki keunggulan dalam mempertahankan kepentingan ekonomi dan politiknya.

Dalam konteks Selat Malaka, penguatan patroli bersama dan kerja sama keamanan regional harus terus ditingkatkan. Di Laut Natuna Utara, fokus utamanya adalah meningkatkan kehadiran negara melalui patroli maritim dan sistem pengawasan berbasis teknologi. Mengenai Selat Hormuz, strategi Indonesia menekankan diplomasi maritim dan diversifikasi sumber energi untuk mengurangi risiko ketergantungan eksternal.

Strategi Penguatan Pembangunan Ekonomi untuk Titik-Titik Karantina Maritim

Pembangunan ekonomi adalah dimensi yang paling terdampak jika terjadi gangguan di titik-titik rawan maritim.

Penelitian menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi nasional dapat diperkuat melalui:

- Diversifikasi jalur perdagangan internasional.
- Memperkuat konektivitas jalan tol laut.
- Pengembangan Pelabuhan Pintar berbasis Kecerdasan Buatan.
- Pengembangan pusat logistik nasional.
- Memperkuat industri pembuatan kapal nasional.
- Pengembangan energi alternatif dan energi terbarukan.

Menurut Bank Dunia (2024), negara-negara dengan sistem logistik maritim yang kuat mampu mengurangi dampak gangguan geopolitik terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 30%. Selain itu, penguatan ekonomi maritim nasional juga harus didukung oleh peningkatan investasi di sektor pelabuhan, pelayaran, perikanan, dan energi laut.

Strategi Penguatan Keamanan Manusia

Keamanan Manusia menempatkan masyarakat sebagai pusat keamanan maritim. Gangguan di titik-titik rawan maritim dapat berdampak langsung pada:

- Harga kebutuhan pokok.
- Harga energi.
- Peluang kerja di sektor maritim.
- Aktivitas nelayan.
- Stabilitas sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan meliputi:

- Memperkuat ketahanan pangan maritim.
- Perlindungan nelayan nasional.
- Pemberdayaan masyarakat pesisir.
- Program Pertahanan Nasional Maritim.
- Intelijen Maritim Komunitas.

- Literasi keamanan maritim masyarakat.

Menurut Prakoso dkk. (2023), keterlibatan masyarakat pesisir dalam sistem keamanan maritim dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang muncul di wilayah maritim Indonesia.

Strategi Penguatan Lingkungan Laut

Lingkungan laut menjadi dimensi yang semakin penting karena peningkatan aktivitas pelayaran dan konflik maritim berpotensi menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut.

Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang perlu diimplementasikan meliputi:

- Pengembangan Ekonomi Biru.
- Sistem pemantauan lingkungan laut berbasis satelit.
- Pemantauan Lingkungan Kelautan Berbasis AI.
- Pemantauan pencemaran laut.
- Pengawasan terhadap kapal tanker dan kapal pengangkut LNG.
- Memperkuat konservasi kelautan strategis.

Menurut UNEP (2024), kerusakan lingkungan laut di wilayah strategis perdagangan internasional dapat menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang yang sangat besar.

Oleh karena itu, perlindungan lingkungan laut harus menjadi bagian integral dari strategi keamanan titik-titik rawan maritim.

Model Strategi Geostrategis untuk Keamanan Titik Karantina Maritim Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, model strategi geostrategis yang diusulkan terdiri dari lima pilar utama.

Pilar 1: Tata Kelola Keamanan Maritim

- Integrasi kelembagaan maritim.
- Kesadaran Domain Maritim.
- Pusat Data Maritim Nasional.

Pilar 2: Ketahanan Ekonomi Maritim

- Port Pintar.
- Tol Laut.
- Ketahanan rantai pasokan nasional.

Pilar 3: Keamanan Energi Maritim

- Diversifikasi energi.
- Cadangan energi strategis.
- Keamanan distribusi energi.

Pilar 4: Diplomasi Maritim

- Kerja Sama Maritim ASEAN.
- Kerja Sama Maritim Indo-Pasifik.
- Diplomasi Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.

Pilar 5: Keberlanjutan Maritim

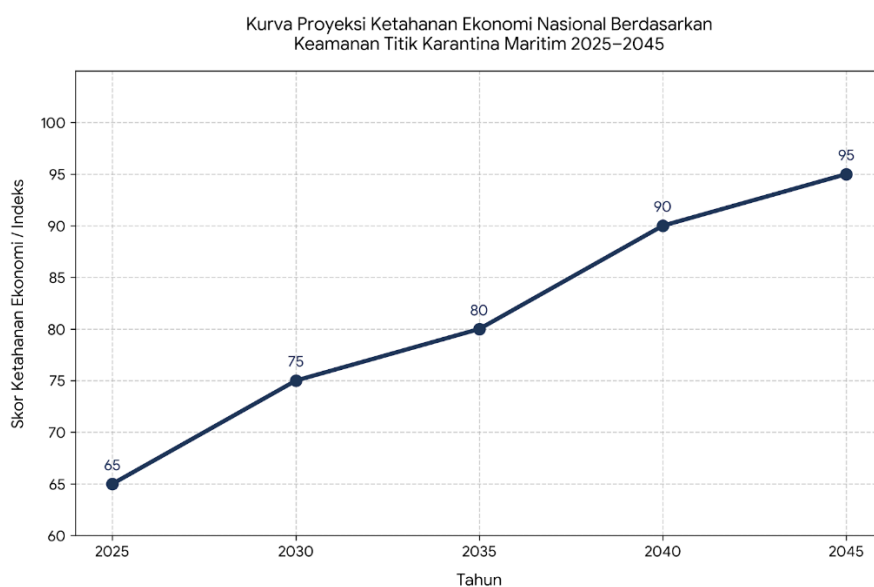
- Ekonomi Biru.
- Pengiriman Ramah Lingkungan.
- Pelestarian lingkungan laut.

Model ini dirancang untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika geopolitik yang memengaruhi keamanan titik-titik rawan maritim global.

Tabel 3. Proyeksi Ketahanan Ekonomi Nasional Berdasarkan Keamanan Titik Karantina Maritim

Tahun	Kekuatan Laut	Pembangunan Ekonomi	Keamanan Manusia	Lingkungan Laut	Indeks Ketahanan Ekonomi
Tahun 2025	68	70	69	66	68,3
Tahun 2030	76	78	77	74	76,3
Tahun 2035	84	85	84	82	83,8
Tahun 2040	91	92	90	89	90,5
Tahun 2045	96	97	95	94	95,5

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).



Gambar 1. Kurva Proyeksi Ketahanan Ekonomi Nasional Berdasarkan Keamanan Titik Karantina Maritim 2025–2045

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Kurva tersebut menunjukkan bahwa implementasi strategi penguatan keamanan titik rawan maritim terintegrasi berpotensi meningkatkan indeks ketahanan ekonomi nasional dari 68,3 pada tahun 2025 menjadi 95,5 pada tahun 2045. Peningkatan ini didorong oleh penguatan kekuatan maritim, keamanan energi, keamanan perdagangan, pengembangan ekonomi maritim, dan peningkatan kualitas tata kelola keamanan maritim nasional.

Ringkasan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz terkait erat dengan ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Gangguan di salah satu wilayah ini berpotensi berdampak pada perdagangan internasional, distribusi energi, rantai pasokan, dan stabilitas ekonomi nasional.

Melalui integrasi Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger dan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso, penelitian ini menghasilkan **model Kerangka Keamanan Titik-Titik Kritis Maritim Geostrategis** yang menempatkan Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Strategi ini sangat penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maritim yang tangguh, berdaulat, dan mampu beradaptasi dengan dinamika geopolitik global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan **Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz** memiliki dampak strategis terhadap ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Ketiga titik rawan maritim ini merupakan jalur vital yang mendukung kelancaran perdagangan internasional, distribusi energi global, stabilitas rantai pasokan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan lingkungan strategis global, yang ditandai dengan meningkatnya persaingan geopolitik, konflik regional, ancaman keamanan maritim, dan gangguan terhadap rantai pasokan global, menjadikan keamanan titik rawan maritim sebagai isu strategis yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia telah mengalami kemajuan melalui penguatan kesadaran domain maritim, patroli maritim, kerja sama regional, diplomasi maritim, dan pembangunan kapasitas kelembagaan. Namun, berbagai tantangan masih tetap ada, seperti integrasi data maritim yang terbatas, koordinasi lintas sektor yang kurang optimal, ketergantungan pada jalur energi global, dan meningkatnya risiko geopolitik di Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Berdasarkan analisis Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger, keamanan titik rawan maritim secara langsung terkait dengan empat dimensi utama keamanan maritim: **Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut**. Oleh karena itu, strategi untuk memperkuat keamanan titik rawan maritim harus diimplementasikan secara komprehensif melalui peningkatan pengawasan maritim, keamanan energi nasional, diplomasi maritim, pembangunan ekonomi maritim, dan perlindungan lingkungan laut.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan keamanan maritim yang dikembangkan oleh Lukman Yudho Prakoso integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi Indonesia dapat membangun sistem keamanan titik rawan maritim yang lebih adaptif dan tangguh. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendukung realisasi Indonesia Emas 2045 sebagai poros maritim global yang aman, tangguh, dan berdaya saing global. Pemerintah perlu memperkuat **Kerangka Keamanan Titik-Titik Karantina Maritim Nasional** yang mengintegrasikan keamanan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan jalur perdagangan strategis internasional ke dalam satu sistem kebijakan nasional yang terpadu. Pengembangan sistem **kesadaran domain maritim berbasis kecerdasan buatan**, satelit maritim nasional, dan sistem pemantauan rantai

pasokan strategis perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan risiko geopolitik. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat diplomasi maritim regional melalui ASEAN, IORA, dan berbagai forum Indo-Pasifik untuk menjaga stabilitas jalur perdagangan internasional. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi energi nasional dan pengembangan cadangan energi strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan di Selat Hormuz. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengembangkan model kuantitatif **Indeks Ketahanan Ekonomi Titik-Titik Kritis Maritim (Maritime Chokepoints Economic Resilience Index/MCERI)** sebagai instrumen untuk mengukur ketahanan ekonomi nasional yang terkait dengan keamanan jalur pelayaran strategis global.

REFERENSI

- Badan Keamanan Laut Republik, I. (2024). *Laporan tahunan keamanan maritim Indonesia 2024*. Jakarta: Bakamla RI.
- Badan Pusat Statistik . (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Bueger , C. (2015). Apa itu keamanan maritim? *Kebijakan Kelautan*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bueger , C., & Edmunds, T. (2017). Melampaui kebutaan laut : Agenda baru untuk studi keamanan maritim. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311. <https://doi.org/10.1093/ia/iix174>
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2018). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran (edisi ke-5)*. Sage Publications.
- Administrasi Informasi Energi. (2024). *Laporan titik hambatan transit minyak dunia 2024*. Washington, DC: Departemen Energi AS.
- Hayton, B. (2018). *Laut Cina Selatan: Perebutan kekuasaan di Asia (edisi ke-2)*. Yale University Press.
- Badan Energi Internasional. (2024). *Prospek energi dunia 2024*. Paris: IEA.
- Biro Maritim Internasional. (2024). *Laporan tahunan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal tahun 2024*. London: Biro Maritim Internasional ICC.
- Organisasi Maritim Internasional. (2024). *Laporan keamanan maritim global 2024*. London: IMO.
- Kaplan, RD (2018). *Kembalinya dunia Marco Polo: Perang, strategi, dan kepentingan Amerika di abad ke-21*. Random House.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja pengawasan sumber hari Ketangkasan dan perikanan Tahun 2024*. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). *Statistik transportasi laut Indonesia tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Lee, PTW, Kwon, OK, & Ruan, X. (2021). Pelabuhan pintar dan transformasi digital maritim di era Industri 4.0. *Maritime Policy & Management*, 48(6), 765–781.
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2018). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode (edisi ke-4)*. Sage Publications.
- Prakoso, LY (2018). *Ketahanan Indonesia maritim dalam perspektif pertahanan negara*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2019). *Strategi keamanan Indonesia maritim dalam perspektif pertahanan negara*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2020). *Implementasi kebijakan Keamanan maritim Indonesia*. Jakarta: Unhan Pers.

- Prakoso, LY (2021). *Geostrategi Indonesia maritim dalam dinamika Indo- Pasifik* . Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2021). *Poros maritim dunia dan ketahanan nasional Indonesia* . Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2022). *Transformasi Keamanan maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Unhan Press.
- Prakoso, LY (2022). *Manajemen strategi Pertahanan maritim Indonesia*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY, Suhirwan , & Widodo, P. (2022). Tata kelola maritim dan implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Studi Maritim dan Integrasi Nasional*, 6(2), 101–115.
- Prakoso, LY, Putra, A., & Nugroho, D. (2023). Ketahanan maritim dan keamanan nasional di kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Isu Keamanan dan Keberlanjutan*, 13(1), 1–15.
- Prakoso, LY, & Putra, A. (2023). Transformasi digital dan ketahanan keamanan maritim di Indonesia. *Jurnal Internasional Urusan Maritim dan Perikanan*, 15(3), 45–61.
- Till, G. (2018). *Kekuatan Maritim : Panduan untuk Abad ke-21 (edisi ke-4)*. Routledge.
- Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan. (2024). *Tinjauan transportasi maritim 2024*. Jenewa: UNCTAD.
- Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2024). *Laporan penilaian ekosistem laut dan keberlanjutan 2024*. Nairobi: UNEP.
- Bank Dunia. (2024). *Prospek ekonomi global 2024: Perdagangan, logistik, dan ketahanan maritim*. Washington, DC: Bank Dunia.
- Forum Ekonomi Dunia. (2024). *Laporan risiko global 2024*. Jenewa: Forum Ekonomi Dunia.
- Yin, RK (2018). *Penelitian dan aplikasi studi kasus: Desain dan metode (edisi ke-6)*. Sage Publications.
- Zhang, H., & Lam, JSL (2022). Ketahanan maritim dan keamanan pelayaran global di kawasan Indo-Pasifik. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 161, 102705. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102705>